

Daftar Pustaka

Buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi, Mappiare, 1983, *Psikologi Orang Dewasa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi 2013, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Ctk. 3, Jakarta
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Goenawan, Kian, 2009, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah Dan Properti*, cetakan 1, Best Publisher, Yogyakarta.
- Hadi, Soetrisno, 1985, *Metodologi Research jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indoneisa*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1995, *Tugas dan Kedudukan PPAT*, Penerbit Majalah Hukum dan Pengembangan Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal 2002, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartika, Elsi Sari dan Advendi Simanunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, Ctk. Kedua, Grasindo, Jakarta.

- Lubis, Muhammad Solly, 2009, *Pergeseran Garis politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*, Visimedia, Bandung.
- Marbun, Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, dan Nusya, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media.
- Murad, Rusmadi, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah*, Mandar Maju, Bandung.
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Patra, Muhammad Zen, dan Daniel Hutagalung, 2007, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI, Jakarta.
- Ramli Samsul dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Ctk. Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Sangsun, Florianus SP, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Satrio, J, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2010, *Panduan Mengurus Setifikat Tanah*, cetakan 1, Visi Media, Jakarta.
- Sholahuddin, Muhammad, 2014, *A Meaningful Life: Menjadikan Hidup Lebih Bermakna*, Partridge Singapore, Singapore.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ke 3, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung.
- Sujarweni, V Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustakabarupress, Yogyakarta
- Sumardjono, Maria SW, 2007, *Kebijakan Pertanahan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Tehupeiory, Aartjie, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Wicaksono, Frans Satriyo, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visi Media, Jakarta.

Widada, Ick Prayogi, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Bintang, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Staatsblad Nomor 84 Tahun 1941 Tentang Akta.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Cakap”, <http://kbbi.web.id/cakap>, diakses tanggal 5 Januari 2015.

Prof. A Djazuli, “Ekonomi Syariah Hanya Buat Yang Dewasa”, www.hukumonline.com, diakses tanggal 20 Januari 2015.

Syafyran Sofyan, “Pejabat Umum”, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan/>, diakses tanggal 23 Januari 2015.

Detik, “Penerbitan Sertifikat”, <http://news.detik.com/wawancara/2743615/menteri-ferry-sering-terjadi-tumpang-tindih-penerbitan-sertifikat>, diakses tanggal 26 Januari 2015.

Jurnal/Artikel/ Tesis-Disertasi

Listyarini, A. Erlina “Kreativitas Guru Pendidikan Jasmani Dalam Pembelajaran Permainan Sepakbola Di sekolah Menengah Pertama”, *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, volume 5, Nomor 1, April, 2006.

Hasan, Djuhaendah, “Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia”, Agustus, 2013.